

Peranan Baitulmal Al-Hidayah Malang dalam Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Modal Sosial

Ria Angela, Darsono Wisadirana, Edi Susilo

Universitas Brawijaya, Malang
e-mail: riaangelawardoyo@yahoo.co.id

Abstrak:

Penelitian ini meneliti tentang peranan Baitulmal Al-Hidayah dalam penanggulangan kemiskinan pada pedagang usaha mikro di kelurahan Jodipan, kota Malang. Selain itu, ia juga meneliti tentang unsur modal sosial dalam pengelolaan Baitulmal Al-Hidayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Alat analisis penelitian ini menggunakan teori modal sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tiga peranan telah dilaksanakan oleh Baitulmal Al-Hidayah, yaitu menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariat berupa penerapan sistem ekonomi Islam, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, dan melepaskan ketergantungan pada rentenir. Strategi pemberdayaan pada pedagang usaha mikro binaan baitulmal tersebut dimulai dari menyelesaikan kebergantungan terhadap rentenir, melakukan pemberdayaan secara kelompok dengan mengumpulkan usaha mereka sesuai dengan konsep hulu ke hilir dengan prinsip solidaritas di antara mereka, melakukan kegiatan pelatihan, memberikan sertifikasi manajemen mutu halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengikutsertakan usaha binaan baitulmal tersebut ke dalam pameran hasil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan melakukan rapat evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh dewan pengawas syariah guna menjamin kepastian dan keberlangsungan usaha mereka.

Kata Kunci:

modal sosial, pemberdayaan, Baitulmal Al-Hidayah, zakat

Abstract:

This study analyzes the roles of Baitulmal Al-Hidayah in alleviation of poverty at micro business merchants in Kelurahan of Jodipan, Malang City. It also analyzes the elements of social capital in the management of the baitulmal. This study uses a qualitative method with a case study. Analysis tools of this study use the theory of social capital and community empowerment. Three roles have been carried out by the Baitulmal Al-Hidayah, ie distancing people from economic practices in the form of non-sharia, ie fostering and funding small businesses, and releasing dependence on moneylenders. Empowerment strategies on micro businesses and traders trained by the baitulmal is starting from completing the dependence on moneylenders, empowering as a group by gather their businesses in accordance with the concept of upstream to downstream with the principle of solidarity between them, conducting training, giving halal quality management certification from the Indonesian Ulama Council (MUI), involving business groups nurtured by the the baitulmal into the exhibition of Micro Small and Medium Enterprises (UMKM), and conducting evaluation meeting conducted

periodically by the sharia supervisory board in order to ensure predictability and sustainability of their businesses.

Keywords:

social capital, empowerment, Baitulmal Al-Hidayah, *zakah*.

Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu pekerjaan rumah besar pemerintah saat ini. Terlebih lagi pada kondisi perekonomian yang mengalami krisis moneter pada 1998 di mana kemiskinan mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 24,2 juta jiwa. Berbagai program pengentasan kemiskinan dari dulu hingga sekarang terus-menerus dilakukan. Pada APBN 2011, dana yang digelontorkan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas perekonomian adalah sekitar Rp. 95 triliun.¹

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah untuk mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan pemeratakan pendapatan, karena pemberdayaan di sektor ini terbukti mampu bertahan pada krisis moneter 1998. Pada 2013, usaha mikro berhasil menyerap 5.408.857 tenaga kerja secara nasional, dan semakin meningkat sebesar 6.039.855 tenaga kerja pada 2014. Seimbang dengan kuantitasnya yang begitu besar, tenaga kerja yang diserap di sektor ini di Provinsi Jawa Timur juga sangat besar. Pada 2013, sebanyak 1.072.286 tenaga kerja diserap, dan pada 2014 terus meningkat menjadi 1.195.368 tenaga kerja. Di tengah sempitnya lapangan pekerjaan dan minimalnya kualitas

SDM yang dimiliki masyarakat kita, usaha di sektor nonformal seakan menjadi solusi bagi mereka untuk menyambung hidup dan memperoleh penghasilan, walaupun pendapatan yang mereka dapat tidak menentu.

Kenyataan menunjukkan, bahwa pelaku usaha kecil dan mikro di negara ini masih mendapat hambatan dalam permodalan. Padahal, minimnya modal merupakan kendala utama bagi pelaku UKM untuk berkembang. Keadaan masyarakat miskin di Kelurahan Jodipanian terhimpit. Keadaan mereka, yang memiliki tenaga dan usaha kuat serta tidak mengenal lelah dan waktu tetapi kekurangan modal usaha, kemudian dimanfaatkan oleh rentenir.² Atas dasar aspirasi warga di Kelurahan Jodipanian, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) membentuk baitulmal di wilayah ini dan menyalurkan dana zakat produktif pada lembaga tersebut, dengan harapan agar masyarakat miskin dapat mengembalikan kondisi ekonominya dan melepaskan diri dari himpitan ekonomi.

Baitulmal sebagai bentuk dari prana sosial telah menjadi salah satu alternatif bagi UKM untuk mendapatkan pembiayaan. Dalam sejarah Islam, baitulmal merupakan institusi keuangan yang bertanggungjawab mengurus cukai. Baitulmal berfungsi sebagai perbendaharaan khalifah dan sultan yang mengurus ke-

¹ Muhammad Sahri, *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat*. (Malang: UB Press, 2012), 58.

² Fauzan Zenrif, *NU di Tengah Globalisasi: Kritik, Solusi dan Aksi* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 221.

wenangan pribadi dan perbelanjaan kerajaan. Ia juga mengurus penagihan zakat untuk rakyat awam. Pakar ekonomi Islam modern menganggap rangka institusi baitulmal merupakan cara yang sesuai untuk masyarakat Muslim sekarang.³

Penelitian ini dipandang perlu untuk mendapatkan gambaran mengenai modal sosial (kepercayaan, partisipasi, norma, nilai, dan hubungan timbal-balik) sebagai identitas perilaku anggota, sehingga menjadi fondasi dalam solusi penanggulangan kemiskinan di wilayah mereka agar anggota KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produktif) Baitulmal Al-Hidayah tidak akan kembali pada cengkeraman rentenir. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan strategi pemberdayaan yang tepat berdasarkan modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran baitulmal dalam penanggulangan kemiskinan berlandaskan modal sosial di Jodipan kota Malang, dan mengembangkan strategi pemberdayaan baitulmal dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan modal sosial di kelurahan ini.

Teori Modal Sosial

1) Kepercayaan

Robert Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* antara anggota masyarakat terhadap pemimpinnya. Kepercayaan ini dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain: (a) seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberanian berpendapat dengan pemimpinnya; dan (b) seberapa banyak warga negara yang meng-

gunakan kesempatan tersebut untuk menyalurkan aspirasinya. Selanjutnya, Putnam mendefinisikan kepercayaan sebagai bentuk keinginan untuk mengambil risiko dalam hubungan-hubungan sosial, yang didasari oleh perasaan “yakin” bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan, dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan saling mendukung. Bahkan, Putnam menegaskan bahwa kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik. Berbagai tindakan kolektif yang didasari rasa saling percaya yang tinggi, sebagaimana diungkapkan oleh Putnam, akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi, terutama dalam konteks membangun bersama. Sebaliknya, kehancuran rasa saling percaya dalam masyarakat akan mengundang berbagai problem sosial yang serius. Masyarakat yang kurang memiliki perasaan saling percaya akan sulit menghindari berbagai ketidaksetiakawanan sosial dan ekonomi yang mengancam, sehingga lambat laun akan mendatangkan biaya tinggi bagi pembangunan.⁴

2) Partisipasi dalam Jaringan

Pernyataan bahwa jejaring sosial berupa jejaring organisasi atau jejaring individu yang berbentuk pertalian dan penghubung mendukung gerak aksi kolektif menjadi semakin sinergis. Infrastruktur dinamis dari modal sosial dapat berwujud jejaring kerjasama antarmanusia. Jejaring kerjasama ini memfasilitasi terjadinya komunikasi, interaksi, kepercayaan, dan kerjasama. Putnam juga berar-

³ Sahri, *Mekanisme Zakat*, 59.

⁴ Hasbullah J., *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia* (Jakarta: MR-United Press, 2006), 11.

gumentasi, bahwa jejaring sosial yang kuat akan memperkuat peran kerjasama dan partisipasi para anggota. Kemampuan anggota masyarakat untuk menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis akan sangat memengaruhi lemah atau kuatnya modal sosial dalam suatu masyarakat. Kemampuan tersebut terwujud dalam bentuk partisipasi dalam membangun jejaring sosial dalam sebuah hubungan yang saling berdampingan. Partisipasi anggota masyarakat harus berlandaskan prinsip sukarela, kesamaan, kebebasan, dan keadaban. Partisipasi dan jejaring sosial yang terbentuk akan memiliki tipologi khas sesuai dengan karakteristik dan orientasi kelompok tersebut. Pada kelompok masyarakat tradisional, partisipasi dan jejaring sosial akan terbentuk didasarkan atas garis keturunan, pengalaman sosial turun-temurun, dan kesamaan kepercayaan pada dimensi religius. Sebaliknya, pada kelompok masyarakat modern yang memiliki kesamaan orientasi dan tujuan melalui pengelolaan organisasi, tingkat partisipasi anggotanya lebih baik serta memiliki rentan jaringan yang luas.⁵

3) Norma-Norma Sosial

Norma-norma sosial berperan penting dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang timbul dalam masyarakat, yang menyatakan bahwa norma mengandung tentang ide kewajiban dan keharusan.⁶ Modal sosial merupakan serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota su-

atu kelompok, yang memungkinkan terjadinya kerjasama di antara mereka.⁷

Norma merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan bisa dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial, yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat. Aturan-aturan tidak kolektif ini biasanya tidak tertulis, tetapi dipahami setiap anggota masyarakat dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial.⁸

4) Nilai-Nilai Sosial

Nilai-nilai kemanusiaan berfungsi untuk mengkoordinasikan manusia. Nilai merupakan tujuan akhir yang pada umumnya ingin dicapai manusia. Nilai ini memberikan motivasi kuat bagi tindakan manusia dan memiliki pengaruh menyeluruh terhadap tindakan manusia sehari-hari. Meskipun sebagai konsepsi nilai bersifat abstrak dan berada dalam bangunan pikiran atau akal budi, tetapi nilai dapat disimpulkan dan ditafsirkan pada level ucapan, perbuatan, dan materi yang dihasilkan. Jadi, suatu ucapan, tindakan, dan materi yang dihasilkan oleh seorang subjek merupakan manifestasi dari nilai.⁹

5) Hubungan Timbal-Balik

Hubungan timbal-balik (*reciprocity*) adalah pertukaran timbal-balik antar-individu atau antarkelompok. Polanyi meletakkan landasan tentang pengertian resiprositas dengan menunjukkan karakteristik dari pelaku pertukaran rasa tim-

⁵ Ibid., 10.

⁶ Leksono, *Runtuhnya Modal Sosial, Pasar Tradisional: Perspektif Emic Kualitatif* (Malang: Citra Malang, 2009), 46.

⁷ Ibid.

⁸ Hasbullah J., *Social Capital*, hlm. 13.

⁹ Leksono, *Runtuhnya Modal Sosial*, 48.

bal-balik yang sangat besar, yang difasilitasi oleh bentuk simetri institusional dengan ciri utama organisasi orang-orang yang tidak terpelajar. Bertolak dari batasan itu, resiprositas tidak dapat berlangsung sebelum hubungan simetris terpenuhi, yaitu hubungan sosial yang masing-masing pelaku menempatkan diri pada kedudukan dan peran yang sama ketika proses pertukaran berlangsung.¹⁰

Konsep Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.¹¹

Tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5-P,¹² antara lain: (1) Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan tumbuh kembangnya potensi yang dimiliki oleh sasaran pemberdayaan, sehingga da-

pat berkembang secara optimal; (2) penguatan, yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh sasaran pemberdayaan dalam rangka memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya; (3) perlindungan, yaitu melindungi sasaran pemberdayaan, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah; (4) penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugasnya; dan (5) pemeliharaan, yaitu pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan yang sama dalam berusaha.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian adalah di Baitulmal Al-Hidayah kota Malang sebagai lembaga pengumpul dan penyalur zakat produktif dari BAZNAS kota Malang di kelurahan Jodipan kota Malang. Baitulmal Al-Hidayah di kelurahan Jodipan dipilih sebagai lokasi penelitian, karena baitulmal di daerah ini merupakan bentuk dari pranata sosial dan mampu melepaskan ketergantungan warga dari jeratan rentenir.

Teknik penentuan informan, dalam penelitian ini, dilakukan secara *purposive*, yang terdiri atas informan dari BAZNAS kota Malang, informan dari Baitulmal Al-Hidayah, informan dari UKM binaan baitulmal di kelurahan Jodipan, dan pegawai kelurahan Jodipan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan: (1)

¹⁰ Ibid., hlm. 127.

¹¹ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2009), 73.

¹² Ibid., 82-83.

mengadakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk memperoleh data primer dari informan, (2) mengadakan observasi atau pengamatan untuk melengkapi dan *cross-check* terhadap data yang diperoleh dari wawancara dengan informan di lokasi penelitian, dan (3) melakukan dokumentasi atau pengumpulan data yang sudah tersusun dalam bentuk dokumen, seperti monografi kelurahan Jodipan, jumlah keluarga miskin di lokasi penelitian sebagai pendukung argumen dalam penentuan lokasi penelitian, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) kota Malang 2015, dan beberapa data pendukung lainnya dari internet, seperti kondisi kemiskinan di Indonesia secara umum, data kemiskinan menurut BPS, *Annual Report* BAZNAS kota Malang, dan lainnya.

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, analisis data-punya pun menganut cara yang digunakan dalam pendekatan kualitatif, yaitu teknik analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang mencakup tiga kegiatan bersamaan, yaitu: 1) Reduksi data; (2) Penyajian data; dan (3) Menarik kesimpulan/verifikasi.¹³ Pada prinsipnya, analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Peranan Baitulmal Al-Hidayah dalam Penanggulangan Kemiskinan

Kelurahan Jodipan adalah satu dari 57 kelurahan padat penduduk di kota Malang. Kelurahan ini berada di kecamatan Blimbing. Sasaran penanggulangan

kemiskinan di kelurahan Jodipan dilaksanakan dengan menggunakan data BPS kota Malang, di mana pada 2015 jumlah penduduk di kelurahan Jodipan sebanyak 13.262 jiwa, yang di dalamnya terdapat 3.447 anggota rumah tangga miskin atau sebanyak 766 KK miskin. Persentase kemiskinan berdasarkan jumlah penduduk kelurahan Jodipan sebanyak 25,99% dari jumlah penduduk di kelurahan Jodipan. Di wilayah ini, jumlah kepala rumah tangga laki-laki sebanyak 615 KK atau lebih besar daripada kepala rumah tangga perempuan yang berjumlah 151 KK.¹⁴

Dari data PPLS kota Malang 2011 untuk distribusi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan, para Kepala Rumah Tangga Miskin yang ada di kelurahan Jodipan didominasi oleh kelompok tidak tamat SD yang berjumlah 387 jiwa atau 50,22% dari jumlah kepala rumah tangga miskin, kemudian disusul oleh kelompok pendidikan SMP yang berjumlah 190 jiwa atau 24,80%. Kepala rumah tangga di kelurahan Jodipan banyak yang tidak mempunyai ijazah, yaitu sebanyak 113 jiwa atau 14,7%. Hanya sedikit saja kepala rumah tangga miskin yang mampu menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun atau lebih, yaitu sebanyak 76 jiwa.

Sedangkan distribusi penduduk berdasarkan kelompok mata pencaharian kepala rumah tangga yang ada di kelurahan Jodipan mayoritas didominasi oleh penduduk dalam kelompok pedagang.

¹³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publication, 1995), 10-13.

KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman
Vol. 24 No. 2, Desember 2016:301-315
Copyright (c) 2016 by Karsa. All Right Reserved
DOI: 10.19105/karsa.v24i2.803

¹⁴ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Malang, *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2015* (Malang: BAPPEKO, 2015), 20.

Tabel 1
Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan
Kelompok Mata Pencapaian
di Kelurahan Jodipan

N o	Bidang Pekerjaan	Jumlah	%
1.	Pertanian	7	0,914
2.	Industri pengolahan	27	3,525
3.	Bangunan/Konstruksi	48	6,266
4.	Perdagangan	218	28,46
5.	Hotel dan rumah makan	36	4,7
6.	Transportasi dan perdagangan	83	10,84
7.	Jasa pendidikan/jasa kesehatan/jasa kemasyarakatan, pemerintahan	194	25,33
8.	Lainnya	153	19,97
	Total	766	100

Sumber: PPLS Tahun 2011 Kota Malang

Dari tabel di atas, dapat dilihat distribusi penduduk berdasarkan kelompok mata pencapaian kepala rumah tangga yang ada di kelurahan Jodipan mayoritas didominasi oleh penduduk dalam kelompok pedagang serta kelompok jasa pendidikan/jasa kesehatan/jasa kemasyarakatan, dan pemerintahan dengan jumlah tenaga kerja berturut-turut sebanyak 218 pekerja dan 194 pekerja. Selain itu, banyak juga kepala rumah tangga di kelurahan Jodipan yang tidak memiliki pekerjaan. Kebanyakan dari mereka bekerja serabutan atau buruh panggilan. Sementara komposisi penduduk berdasarkan kelompok mata pencapaian terkecil dari kepala rumah tangga miskin terdapat pada kelompok pertanian.

Program Baitulmal Al-Hidayah adalah menyalurkan dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha dalam bentuk kredit yang ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi. Besarnya modal usaha yang mereka pinjam beragam, dari Rp. 500.000,- hingga Rp. 5.000.000,-. Pada ta-

hap awal, pendistribusian dana zakat produktif di kelurahan Jodipan adalah untuk menolong warga melepaskan diri dari hutang kepada rentenir yang sudah bertahun-tahun. Dana zakat yang telah diberikan kepada masyarakat Jodipan untuk melepaskan mereka dari jeratan rentenir sebanyak Rp. 75.000.000,- atau sebanyak 60 warga. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya diwajibkan penyaluran dana zakat bagi mereka yang memiliki usaha.¹⁵

Tabel 2
Pendistribusian Zakat Produktif di Baitulmal Al-Hidayah Jodipan

Tahap Penyaluran	Jumlah Rentenir	Modal (Rp)
I	60	75.000.000
II	77	110.000.000
III	66	100.000.000
IV	51	102.000.000
V	61	113.000.000
Total	315	500.000.000

Sumber: Annual Report BAZNAS 2014

Pengajuan kredit modal usaha diberikan kepada warga Jodipan yang tergolong *mustahiq* dan bertekad memerangi kemiskinan pada diri mereka. Kredit modal usaha ini mereka gunakan untuk wirausaha berdagang di pasar Kebalen atau berdagang di depan rumah. Pada umumnya, mereka adalah pedagang bakso, gorengan, dan pangsit, yang pada dasarnya adalah usaha mikro sebagai PKL.

Pengembalian kredit modal usaha ini dilakukan secara mengangsur tanpa bunga. Angsuran bisa dilakukan setiap hari ketika mereka berjualan, dan ada pula yang mingguan. Besaran angsuran berkisar Rp. 3.000,- sampai Rp.15.000,- perhari. Para anggota berkewajiban menyalurkan infaknya, yang ditentukan ma-

¹⁵ BAZNAS Kota Malang, *Annual Report 2014* (Malang: BAZNAS Kota Malang, 2014), 23.

masing-masing anggota sebesar Rp. 10.000,- perbulan. Infak ini digunakan untuk menyantuni janda-janda lansia yang berada di sekitar lingkungan mereka dan dilaksanakan pada setiap menjelang lebaran. Selain itu, anggota juga diperkenankan menabung di baitulmal tanpa bunga dan potongan. Besar tabungan sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka, tidak dipaksakan. Para anggota bisa melakukan pinjaman lagi setelah pinjamannya lunas. Lama pemberian kredit ini bervariasi. Namun, batas maksimalnya adalah empat bulan. Sebagian peminjam yang aktif telah beberapa kali mendapatkan pinjaman, tetapi ada sebagian lagi yang tidak disiplin dalam mengasur pinjamannya. Namun, secara keseluruhan, anggota yang meminjam di baitulmal adalah warga Jodipan, sehingga mempermudah pengawasan mereka apabila terjadi penyelewengan. Dari 315 anggota, ada empat anggota saja yang dilarang meminjam kembali di baitulmal. Hal ini karena mereka menyalahgunakan kepercayaan yang merupakan norma yang wajib ditaati oleh setiap anggota baitulmal, yaitu anggota tidak boleh lagi melakukan peminjaman kepada rentenir. Jika norma ini dilanggar, mereka akan dicoret dari keanggotaan.

Pembinaan yang dilakukan adalah berupa pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS. Pelatihan ini berupa pelatihan membuat *bakery*, *ice cream*, dan bakso. Mereka cukup merasakan manfaat pelatihan ini, karena mereka dilatih tentang cara membuat bakso yang sehat dan halal. Banyaknya jenis usaha yang terdapat di baitulmal membuat kegiatan pelatihan ini diselenggarakan hanya pada jenis usaha yang mayoritas dilakukan oleh mereka. Selain itu, untuk

memperluas jaringan usaha mereka, setiap baitulmal bersatu mengembangkan UKM yang ada di masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok dengan prinsip kesamaan usaha. Kelompok usaha tersebut dinamakan KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produktif). KMKP ini diarahkan dengan pendampingan dan dikelompokkan atas ikatan solidaritas sosial, seperti kesamaan tujuan dan kesamaan kegiatan usaha. Usaha yang dirancang memiliki jenis usaha yang sama dan mendukung konsep dari hulu hingga ke hilir, mulai dengan rencana produksi hingga pemasaran.

Dari mereka yang mendapatkan pinjaman, sebagian besar mereka bisa meningkatkan penghasilannya, tetapi kenaikan itu bersamaan dengan kenaikan kebutuhan keluarga mereka. Pada umumnya, kenaikan pendapatan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak tersisa, sehingga mereka tidak bisa berinfak dan menabung. Walaupun di antara mereka masih ada yang mampu menabung dan berinfak, tetapi tabungan mereka hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan jangka pendek. Biasanya, tabungan diambil untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, membeli perabotan rumah tangga mereka, dan lainnya.

Modal Sosial pada Baitulmal Al-Hidayah

Solusi penanggulangan kemiskinan dalam paradigma zakat menempatkan penguatan kelembagaan baitulmal sebagai unsur penting untuk menjadikan pengelolaan zakat dan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara profesional, sekaligus akan membangkitkan modal sosial bagi masyarakat miskin. Penguatan modal sosial merupakan kunci penting

untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin secara merata. Temuan-temuan unsur modal sosial dalam pengelolaan Baitulmal Al-Hidayah dalam penanggulangan kemiskinan antara lain:

1. Kepercayaan

Adanya sikap saling percaya di antara anggota masyarakat akan mempertinggi keeratan harmoni hubungan antar-anggota masyarakat pada suatu komunitas. Pada tahap awal, penyaluran dana zakat kepada para *mustahiq* fokus pada pemberantasan rentenir. Kemudian dalam pengajuan pada tahap selanjutnya diwajibkan sudah ada bentuk usahanya. Para calon anggota harus melakukan tahap seleksi dengan cara bersedia untuk dibantu menyelesaikan hutangnya kepada rentenir dan berjanji untuk tidak kembali kepada rentenir atau kredit yang berkedok koperasi abal-abal. Perjanjian itu secara alami merupakan ikatan saling percaya dan memiliki perasaan “yakin” bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan.¹⁶ Hal ini ditunjukkan dengan peran serta aktif anggota. Seperti yang diungkapkan Hartati, salah seorang anggota BAZNAS, bahwa dirinya selalu melakukan pembayaran angsuran ke koordinator sebelum waktu akhir pekan tiba, karena pada saat itulah jadwal pembayaran angsuran.¹⁷ Ketua baitulmal memberikan pemahaman kepada anggota baitulmal, bahwa dana yang digunakan oleh baitulmal untuk membantu masyarakat Jodipan itu berasal dari uang kiai di BAZNAS dan akan dimintai pertanggungjawabannya setiap bulan di hadapan kiai dan ketua BAZNAS. Hal tersebut membuat kerjasama antara ketua

baitulmal dan anggota baitulmal terjalin untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kiai kepada mereka. Sikap yang ditunjukkan Hartati dengan ketua baitulmal menandakan terjalinnya kepercayaan orang-orang yang bekerjasama atas dasar saling percaya untuk melakukan kerjasama dengan baik karena adanya kesediaan mereka untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kepercayaan seperti ini yang membuat kelompok masyarakat dan baitulmal dapat bertahan dalam kegiatan penyaluran zakat kepada *mustahiq*. Ketua baitulmal memberikan kepercayaan kepada warganya dengan prinsip saling percaya dengan harapan warganya akan mau menaati peraturan baitulmal.

2. Partisipasi dalam Suatu Jaringan

Dalam kegiatan baitulmal telah terlihat partisipasi dari para anggota dan koordinator untuk membangun sejumlah asosiasi dan sejumlah jaringan. Partisipasi yang dilakukan anggota ini muncul tanpa paksaan dari siapa pun. Mereka menggunakan prinsip kesamaan nasib berupa kesusahan ekonomi dan pernah terlilit hutang kepada rentenir. Persahabatan yang terjalin antartetangga ini digambarkan oleh Hartati, salah seorang anggota baitulmal yang berprofesi sebagai pedagang bakso dan pernah terlilit hutang kepada rentenir. Menurutnya, walaupun sama-sama mengalami kesusahan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi dan tidak bisa membantu secara langsung, dirinya tetap membantu dengan memberikan saran kepada para tetangga yang mengalami kesusahan dengan mengajak mereka meminjam kepada baitulmal. Karena perasaan senasib dan kekeluargaan

¹⁶ Hasbullah J., *Social Capital*, 11.

¹⁷ Wawancara dengan Hartati, tanggal 23 Mei 2016.

yang dekat membuat dirinya memberikan saran agar tidak mengambil uang ke rentenir. Selain itu, walaupun dirinya bukan seorang koordinator, dia selalu mengingatkan tetangga yang menjadi anggota baitulmal agar tidak lupa membayar uang angsuran kepada koordinator.¹⁸ Hal inilah yang membuat modal sosial di kelembagaan dapat berjalan kuat di lembaga ini.

3. Norma Sosial

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Biasanya, norma-norma ini terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi-sanksi sosial.¹⁹ Modal sosial yang ada di baitulmal dengan mengembangkan norma dan nilai kejujuran, saling memercayai antara ketua, koordinator, dan anggota termasuk KMKP produksi dan pemasaran, akan menciptakan kinerja baitulmal yang kokoh berlandaskan modal sosial yang kuat di antara mereka.

Persyaratan untuk melakukan pemanfaatan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) yang berupa pinjaman adalah dengan menjadi anggota terlebih dahulu. Norma ini tergolong dalam norma informal atau tidak tertulis, karena tidak ada syarat peminjaman untuk menjadi anggota terlebih dahulu baru boleh meminjam. Berbeda dengan cara untuk menjadi anggota yang secara tertulis, dan digolongkan ke dalam norma formal. Adapun cara menjadi anggota perlu memenuhi kelengkapan administrasi yang terdiri atas: (1) Menyerahkan fotokopi KTP; (2)

menyerahkan fotokopi KK; (3) menabung di baitulmal secara sukarela; (4) anggota harus melampirkan foto usahanya; dan (5) membayar infak yang ditentukan sebesar Rp. 10.000,- perbulan.

Dengan melengkapi kelengkapan administrasi di atas, secara otomatis anggota menerima kartu angsuran yang otomatis menjadi kartu anggota sebagai bukti keanggotaan menjadi anggota baitulmal. Setelah itu, anggota berhak untuk memperoleh pinjaman dana dari baitulmal.

Adapun dalam setiap melakukan peminjaman di baitulmal, ada ketentuan: (1) Anggota dapat melakukan pengajuan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- hingga Rp. 5.000.000,- perorang atau sesuai kebutuhan (hal ini tidak ada secara tertulis, sehingga dikategorikan sebagai norma informal); (2) pinjaman tidak dikenakan bunga (bunga 0%); (3) waktu pengembalian selama empat bulan (hal ini tidak ada secara tertulis, sehingga dikategorikan sebagai norma informal; dan (4) bersedia untuk tidak kembali berhutang kepada rentenir atau koperasi yang berkedok rentenir.

Sebenarnya, aturan di atas tidak sepenuhnya ada secara tertulis atau disebut juga norma informal. Sedangkan aturan tertulis merupakan norma formal. Dengan adanya aturan/norma tersebut, segala proses keorganisasian diharapkan bisa berjalan lancar.

Contoh penyimpangan norma yang membuat pengembangan menjadi terhambat dapat dilihat pada setiap kegiatan peminjaman. Pada kegiatan peminjaman, ada sanksi apabila terlambat dalam pengembalian, yaitu: *Pertama*, teguran. Apabila teguran tidak dihiraukan, berlaku sanksi *kedua*, yaitu nominal pin-

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Hasbullah J., *Social Capital*, 13.

jaman dikurangi. Apabila pelanggaran berlanjut, berlaku sanksi *ketiga*, yaitu tidak diberi pinjaman lagi. Adanya rasa saling kebersamaan dan memiliki baitulmal membuat antarunsur, baik ketua, koordinator, maupun anggota secara bersama-sama berupaya menjunjung norma-norma yang telah disepakati. Ini dilakukan agar tercipta iklim kondusif dan memperkokoh keberadaan baitulmal di tengah masyarakat Jodipan.

4. Nilai Sosial

Sebagaimana juga telah disinggung sebelumnya, nilai bersifat abstrak yang berada dalam bangunan pikiran atau akal budi, tetapi nilai dapat disimpulkan dan ditafsirkan pada level ucapan, perbuatan, dan materi yang dihasilkan. Nilai-nilai yang teridentifikasi dari pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh baitulmal, antara lain: sejak ketua baitulmal aktif dalam kegiatan baitulmal ada beberapa rentenir yang warganya sendiri tidak peduli kepadanya; mereka menjauh dan tidak mau berinteraksi dengannya. Dia menyadarinya sebagai konsekuensi perjuangan menegakkan syariat agama. Nilai agama senantiasa berperan penting dan menjadi dasarnya sebagai ketua baitulmal di wilayahnya.

Keyakinan dan semangat pada dirinya semakin besar untuk memberantas rentenir dan menanggulangi kemiskinan di wilayahnya ketika sebagian besar warganya, yang merupakan anggotanya, bersemangat mendukung setiap keputusannya saat memberantas rentenir. Dengan demikian, secara tidak langsung, telah terjalin hubungan solidaritas sosial di antara mereka.

Anggota baitulmal selalu memberi keyakinan kepada ketua baitulmal untuk terus berjuang melawan rentenir. Hubungan ketua baitulmal dengan anggotanya melebihi ikatan pertetangga, bahkan seperti keluarga. Ikatan kekeluargaan ini memperkuat setiap elemen baitulmal untuk bersama-sama memajukan baitulmal. Nilai kesukarelaan dan kebersamaan mewarnai hubungan ketua dan anggota.

5. Hubungan Timbal-Balik

Elemen hubungan timbal-balik terlihat pada KMKP yang telah dibentuk berupa penjualan bakso. KMKP ini dibagi ke dalam tiga KMKP: (1) KMKP Pedagang Daging, (2) KMKP Produksi, dan (3) KMKP Pemasaran. KMKP Produksi mencakup anggota baitulmal yang bergerak di sektor penjualan daging sapi. Mereka dilatih. MUI mengambil sumpah mereka untuk menjual daging sapi berkualitas, sehat, dan halal. Selain menjual daging sapi untuk konsumen umum, KMKP Pedagang Daging juga menyediakan stok daging bagi KMKP Produksi. Anggota KMKP Produksi mendapatkan pelatihan dan keterampilan membuat bakso daging sapi berkualitas, sehat, dan halal sesuai dengan fatwa MUI. Ketersediaan bakso berkualitas ini akan dipasarkan oleh KMKP Pemasaran, yang sengaja dikumpulkan dan dibentuk dari beberapa anggota yang bergerak di bidang yang sama, yaitu pedagang bakso di seluruh baitulmal se-kota Malang. Anggota KMKP Pemasaran akan menerima bakso sehat tersebut dan memasarkannya kepada konsumen dengan harga yang sama sesuai dengan kesepakatan anggota lainnya. Dengan adanya KMKP ini, pedagang dapat menjual bakso yang halal dengan harga murah, sehingga masyarakat dapat dengan

mudah mengonsumsi bakso yang sehat dan halal. Dengan adanya hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan kelompok pemberdayaan, membuat pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin akan kuat dengan modal ikatan solidaritas sosial.

Strategi Pemberdayaan dengan Pendekatan Modal Sosial

Dalam pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan dengan strategi partisipatif dalam koridor modal sosial, diperlukan penumbuhkembangan baitulmal. Proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan yang disingkat 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.

Pertama, pendekatan pemungkinan. Penelitian ini menggali sejauhmana menciptakan suasana yang memungkinkan tumbuhkembangnya potensi yang dimiliki sasaran pemberdayaan, sehingga tidak timbul perselisihan dan dapat bersama-sama mencapai kemajuan dan berkembang secara optimal.

Kegiatan pemungkinan akan berpusat pada diri individu anggota baitulmal, yaitu dengan menghilangkan faktor penghalang yang selama ini berpengaruh pada partisipasinya dalam kegiatan pemberdayaan. Untuk itu, warga Jodipan yang menjadi anggota baitulmal harus berjanji melepaskan diri dari ketergantungan kepada rentenir dan bersedia untuk tidak kembali berhutang kepada mereka. Baitulmal dan BAZNAS akan memberikan dana kepada anggota yang bersedia, dan membantu mereka menyelesaikan masalah hutang kepada rentenir. Setelah itu, anggota diharap akan terbe-

bas dari hutang dan dapat bekerja. Perjanjian itu merupakan ikatan saling percaya di antara mereka.

Peranan modal sosial pada pendekatan ini sangatlah besar. Unsur kepercayaan seperti energi yang membuat kelompok masyarakat dan baitulmal dapat bertahan menyelesaikan permasalahan warga untuk tidak berhutang lagi kepada rentenir. Ketua baitulmal memberikan kepercayaan kepada warganya dengan membantu melunasi hutang kepada rentenir dengan prinsip saling percaya, dengan harapan mereka mau untuk menaati peraturan baitulmal. Di antara kegiatan yang disusun berdasarkan pendekatan pemungkinan pada strategi pemberdayaan ini dilakukan dengan mengumpulkan usaha-usaha mikro binaan BAZNAS yang sejenis. Setiap kelompok direkomendasikan memiliki usaha yang sama dan mendukung konsep hulu hingga hilir, mulai dari produksi hingga pemasaran. Tujuan pembentukan kelompok yang mempunyai usaha sejenis adalah menumbuhkan ikatan solidaritas di antara mereka, sehingga kemandirian kelompok dalam memecahkan permasalahan dapat terwujud.

Pemberdayaan di baitulmal menciptakan suasana yang memungkinkan pertumbuhan potensi yang dimiliki sehingga dapat berkembang secara optimal sekaligus pertumbuhan sistem jaringan, mulai dari sistem produksi dan pemasaran, sehingga kekuatan ekonomi masyarakat dapat tumbuh kokoh, dan pada akhirnya akan mewujudkan kemandirian ekonomi pada masyarakat miskin. Dengan adanya pengelompokan berdasarkan rasa ikatan solidaritas ini, nilai-nilai tersebut bisa dipertahankan. Jika nilai tersebut bertahan, modal sosial ini akan se-

makin kuat untuk mengentaskan kemiskinan dibandingkan dengan pemberian modal dalam bentuk uang.

Kedua, pendekatan penguatan. Penelitian ini menggali sejauhmana kesadaran pelaku usaha mikro untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga potensi yang dimiliki dapat meminimalkan dan memecahkan permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pemberdayaan.

Pendekatan penguatan terlihat dalam keikutsertaan anggota dalam berbagai kegiatan pengembangan potensi, seperti pelatihan pembuatan sabun, *bakery* dan *ice cream*, dan bakso, yang merupakan upaya mereka untuk mengembangkan potensi, sehingga mampu memperbaiki keadaan ekonominya jauh lebih baik. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan keterampilan pada anggota dan warga yang sangat dibutuhkan dalam proses peningkatan wawasan dan keterampilan mereka. Dalam pelatihan tersebut, mereka dilatih cara pembuatan kue dan *ice cream* yang enak dan halal. Selain itu, mereka dilatih tentang cara pengemasan hasil produksi, sehingga dapat membuka peluang pasar mereka. Setelah pelatihan tersebut, warga diberikan alat produksi, sehingga mereka dapat langsung mempraktikkan dan menjualnya. Dalam pelaksanaannya, ketua dan para koordinator baitulmal selalu mengawasi dan mendampingi apabila ada kendala dalam pelaksanaan produksi dan pemasaran.

Ketiga, pendekatan perlindungan. Penelitian ini menggali sejauhmana usaha anggota atau pelaku usaha mikro melindungi usahanya dari persaingan pengusaha yang lebih besar dan pelaku usaha

mikro lainnya, yang sering muncul bahkan dengan usaha sejenis.

Pendekatan ini terlihat pada setiap anggota yang dalam dirinya telah tertanam nilai kejujuran untuk selalu mempertahankan kualitas dagangannya. Selain itu, untuk melindungi dan mempertahankan usahanya dari persaingan bisnis yang semakin ketat, mereka senantiasa mempertahankan kualitas produksinya dan aktif mengikuti kegiatan pameran, baik guna mengenalkan atau memasarkan dagangan mereka kepada konsumen yang jauh dari lingkungan mereka. Proses pemberdayaan pada unsur pendekatan perlindungan ini tertuju pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses kepada sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan, sehingga terhindar dari persaingan yang tidak seimbang dan tidak sehat antara yang kuat dan lemah, serta mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

Keempat, pendekatan penyokongan. Penelitian ini menggali sejauhmana penyokongan dilakukan dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugasnya. Kegiatan penyokongan dilakukan dengan penguatan peran koordinator dan ketua baitulmal sebagai pihak yang paling dekat dengan anggota atau *mustahiq*, penerima manfaat dari dana ZIS. Penguatan ini dapat dilakukan baik dari peningkatan kapasitas aparatur, sarana, dan prasarana penunjang agar mereka dapat memberikan pelayanan maksimal. Sumber kegiatan penyokongan di baitulmal berupa zakat yang diterima BAZNAS da-

ri PNS se-kota Malang. Optimalisasi penerimaan zakat harus dilakukan dengan menumbuhkan kepercayaan calon *muzakki* agar mau mengeluarkan zakatnya kepada BAZNAS.

Penyokongan juga dilakukan oleh seluruh baitulmal di kota Malang pada lingkungan masyarakat sekitar. Dengan kekuatan jaringan seluruh baitulmal, sinergitas kegiatan pemberdayaan dan dukungan konsep pemberdayaan dari hulu ke hilir dapat dilakukan dengan baik. Masyarakat sekitar perlu mendapatkan pemahaman tentang pemberdayaan agar pelaksanaan pemberdayaan menjadi kondusif. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang pelaksanaan pemberdayaan, sehingga masyarakat paham dan mendukung proses pemberdayaan.

Kelima, pendekatan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan dilakukan agar pemberdayaan mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan, yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan yang sama dalam berusaha. Dalam pendekatan pemeliharaan, kegiatan yang dilakukan berupa rapat evaluasi rutin untuk menjalin koordinasi terkait permasalahan dan kegiatan baitulmal di kota Malang. Rapat ini dihadiri oleh seluruh pengurus baitulmal dan pengurus serta dewan pengawas BAZNAS kota Malang. Pada tahap ini, partisipasi untuk membangun jaringan menjadi kekuatan dalam kegiatan pemberdayaan.

Penutup

Peran yang telah dilaksanakan Baitulmal Al-Hidayah adalah menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariat dengan menerapkan sistem ekonomi Islami, yaitu dengan memberikan modal tanpa bunga, melakukan pembi-

naan dan pendanaan usaha kecil, dan melepaskan ketergantungan pada rentenir. Modal sosial yang dimiliki masyarakat Jodipan menjadi dasar bagi terlaksananya kegiatan penyaluran zakat produktif, yang dilakukan dengan proses pemberdayaan di antara mereka. Norma kekeluargaan, kebersamaan, dan kepercayaan menjadi pendorong bagi para *mustahiq* (anggota) untuk membuat saudara se-kampungnya bergabung menjadi anggota baitulmal agar terlepas dari jeratan rentenir. Selain itu, norma-norma ini dapat memperluas jejaring yang telah mereka miliki, sehingga jaringan ini tidak hanya terbatas pada kelompok usaha yang ada di kampungnya saja, tetapi juga dengan pihak-pihak yang mendukung pengembangan usaha mereka, seperti BAZNAS dan kelompok jaringan dengan usaha sejenis di baitulmal lainnya di kota Malang.

Strategi pemberdayaan pada pedagang usaha mikro binaan baitulmal dimulai dari peniadaan faktor penghalang, yang selama ini berpengaruh pada partisipasinya dalam kegiatan pemberdayaan berupa ketergantungan terhadap rentenir. Selanjutnya, pemberdayaan dilakukan secara kelompok dengan mengumpulkan usaha mereka sesuai dengan konsep hulu ke hilir dengan prinsip solidaritas di antara mereka. Setelah itu, kegiatan pelatihan dilakukan dengan memberikan sertifikasi manajemen mutu halal dari MUI, mengikutsertakan usaha binaan baitulmal dalam pameran hasil UMK, dan dewan pengawas syariah melakukan rapat evaluasi secara berkala guna menjamin kepastian dan keberlangsungan usaha mereka, sehingga secara berkala dan dalam waktu panjang akan men-

jadikan mereka mandiri dan melahirkan muzakki baru. []

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Malang. *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2015*. Malang: BAPPEKO, 2015.
- BAZNAS Kota Malang. *Annual Report 2014*. Malang: BAZNAS Kota Malang, 2014.
- Field, John. *Modal Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2014.
- Fukuyama, Francis. *Trust: The Social Virtues and Creation of Prosperity*. NY: Free Press, 1995.
- Hasbullah J. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press, 2006.
- Leksono. *Runtuhnya Modal Sosial, Pasar Tradisional, Perspektif Emic Kualitatif*. Malang: Citra Malang, 2009.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 1995.
- Sahri, Muhammad. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*. Malang: Bahtera Press, 2006.
- Sahri, Muhammad. *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat*. Malang: UB Press, 2012.
- Soenyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Kediri: Jenggala Pustaka Utama, 2007.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Zenrif, Fauzan. *NU di Tengah Globalisasi: Kritik, Solusi dan Aksi*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.

